

GLOKALISASI PARIWISATA BALI: PURA SEBAGAI DESTINASI WISATA DI BALI

Dinar Sukma Pramesti*

<http://doi.org/10.5614/wpar.2026.24.1.02>

Diserahkan : 3 Juni 2025

Diterima: 20 Agustus 2025

Diterbitkan: 30 Juni 2026

*Penulis korespondensi, e-mail:

dinar.pramesti@pib.ac.id

Glokalisasi menjadi konsep yang semakin relevan dalam memahami dinamika hubungan antara globalisasi dan budaya lokal, khususnya dalam konteks pariwisata budaya. Globalisasi melalui pariwisata membawa dampak ekonomi yang signifikan, namun sekaligus menghadirkan tantangan terhadap keberlanjutan nilai-nilai budaya dan kesakralan ruang ibadah. Bali sebagai destinasi wisata internasional menghadapi dinamika tersebut, terutama dalam pengelolaan pura yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat spiritual umat Hindu, tetapi juga berkembang sebagai daya tarik wisata budaya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana glokalisasi bekerja dalam praktik pariwisata Bali dengan menjadikan Pura sebagai representasi utama negosiasi antara nilai budaya lokal dan kepentingan ekonomi pariwisata, dengan fokus pada studi kasus Pura Luhur Uluwatu. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dan observasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan glokalisasi tercermin melalui pengaturan zonasi ruang sakral dan profan, penerapan aturan berpakaian dan etika kunjungan, serta keterlibatan aktif masyarakat adat dalam pengelolaan pura. Perbandingan dengan pengelolaan Kompleks Candi Borobudur dan kawasan budaya Tana Toraja menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata budaya sangat bergantung pada penguatan peran komunitas lokal sebagai aktor utama dalam mengelola pengaruh global. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa glokalisasi merupakan strategi adaptif yang memungkinkan pariwisata budaya berkembang tanpa menghilangkan makna sakral dan identitas budaya lokal, sehingga mendukung keberlanjutan pariwisata di Bali.

Kata kunci: *Glokalisasi, Pariwisata Budaya, Pura, Bali, Pura Luhur Uluwatu.*

Glokalisasi merupakan konsep yang semakin relevan dalam memahami dinamika hubungan antara globalisasi dan budaya lokal. Istilah ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa globalisasi dengan arus informasi, modal, dan mobilitas manusia yang semakin cepat dapat menggerus identitas serta nilai-nilai lokal yang telah lama hidup dan mengakar dalam masyarakat. Jika globalisasi cenderung menekankan pada keterhubungan dunia secara luas dan seragam, maka glokalisasi justru menempatkan unsur lokal sebagai aktor utama dalam menyaring, menyesuaikan, dan mengelola pengaruh global tersebut.

Benyamin & Prasetya, (2015) memaknai glokalisasi sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi, khususnya dalam melindungi budaya lokal agar tidak tersingkir oleh budaya asing yang lebih dominan. Sementara itu, Drori et al. (2013) merumuskan glokalisasi sebagai pendekatan *thinking globally, acting locally*, yakni berpikir secara global namun bertindak sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan nilai lokal yang berlaku. Dengan demikian, glokalisasi bukanlah bentuk penolakan terhadap globalisasi, melainkan strategi adaptif agar masyarakat lokal tetap memiliki kendali atas arah perubahan yang terjadi.

Dalam era globalisasi, industri pariwisata berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Pariwisata tidak hanya berkontribusi pada peningkatan devisa negara, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan membentuk citra suatu daerah di mata dunia. Di banyak wilayah, pariwisata bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, memengaruhi cara berpikir, berperilaku, serta memaknai budaya mereka sendiri. Bali merupakan salah satu contoh paling nyata dari dinamika tersebut. Pulau ini telah lama dikenal sebagai destinasi wisata internasional yang mengandalkan keindahan alam, seni, budaya, dan spiritualitas sebagai daya tarik utama. Globalisasi melalui pariwisata telah berhasil menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia, sekaligus membawa masuk nilai, gaya hidup, dan praktik budaya asing. Subawa (2018), mencatat bahwa interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali.

Dalam konteks pariwisata, kebudayaan Bali tidak lagi hadir semata sebagai warisan yang dijalkan secara internal oleh masyarakat, tetapi juga sebagai sesuatu yang ditampilkan,

dikemas, dan dikonsumsi oleh wisatawan. Salah satu elemen budaya yang mengalami proses tersebut adalah pura. Widiastini et al (2015) menunjukkan bahwa pura telah berkembang menjadi destinasi wisata budaya, tanpa sepenuhnya melepaskan fungsi utamanya sebagai tempat peribadatan umat Hindu. Keunikan arsitektur, nilai sejarah, serta aura kesakralan pura menjadikannya magnet kuat bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat budaya dan spiritualitas Bali. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana glokalisasi bekerja dalam praktik pariwisata Bali, dengan menempatkan pura sebagai representasi utama negosiasi antara nilai budaya lokal dan kepentingan ekonomi pariwisata. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa pariwisata budaya tidak hanya soal daya tarik visual, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat lokal mengelola perubahan agar tidak kehilangan jati diri.

Pura sebagai Destinasi Wisata di Bali

Bali sering dijuluki sebagai *The Island of Gods* atau *Pulau Seribu Pura*, merujuk pada banyaknya pura yang tersebar hampir di setiap desa adat. Keberadaan pura tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Hindu Bali, karena pura berfungsi sebagai pusat spiritual, sosial, dan budaya. Di dalam kompleks pura tersimpan berbagai peninggalan bersejarah seperti lingga, arca, prasasti, dan purana yang memiliki nilai historis dan religius tinggi. Oleh karena itu, pura dipandang sebagai ruang yang sangat disucikan dan dijaga secara turun-temurun.

Seiring berkembangnya pariwisata, pura kemudian dilihat sebagai bagian dari atraksi wisata budaya. Keindahan arsitektur pura yang khas, tata ruang yang sarat makna filosofis, serta lokasinya yang sering kali menyatu dengan alam menjadikannya objek yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat, tetapi juga untuk belajar dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Namun, membuka pura sebagai destinasi wisata tidak lepas dari konsekuensi ekonomi. Penerapan tiket masuk atau donasi bagi wisatawan menunjukkan adanya orientasi ekonomi yang melekat dalam praktik pariwisata. Dana yang diperoleh umumnya digunakan untuk pemeliharaan pura, pelaksanaan upacara keagamaan, serta penyediaan fasilitas pendukung bagi wisatawan. Di satu sisi, hal ini membantu keberlanjutan pura; di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa nilai sakral dapat tergeser oleh logika komersial.

Untuk menjaga keseimbangan tersebut, masyarakat Bali menerapkan berbagai bentuk glokalisasi. Wisatawan diwajibkan mengenakan kain dan selendang sebagai simbol penghormatan, dipasang papan informasi mengenai etika kunjungan, serta diberlakukan batasan area yang boleh dan tidak boleh dimasuki. Beberapa pura juga melibatkan pemandu lokal atau pengawas adat yang berfungsi sebagai

penjaga nilai budaya sekaligus jembatan komunikasi antara wisatawan dan masyarakat lokal.

Contoh Kasus: Pura Luhur Uluwatu dan Dinamika Glokalisasi

Pura Luhur Uluwatu merupakan salah satu dari enam pura Sad Kahyangan Jagat yang memiliki tingkat kesucian tinggi bagi umat Hindu Bali. Terletak di puncak tebing yang menghadap langsung ke Samudera Hindia, pura ini memiliki daya tarik visual dan simbolik yang sangat kuat. Keindahan alam berpadu dengan arsitektur pura menjadikannya salah satu ikon pariwisata budaya Bali. Dalam konteks glokalisasi, Pura Luhur Uluwatu memperlihatkan bagaimana nilai lokal beradaptasi terhadap eksposur global melalui pariwisata.

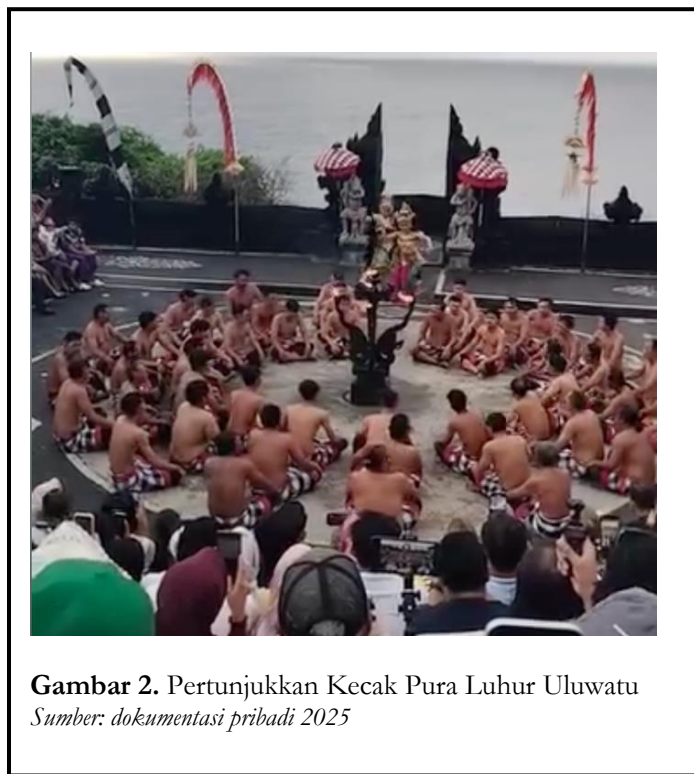


Gambar 1. Pura Luhur Uluwatu
Sumber: dokumentasi pribadi 2025

Pertunjukan Tari Kecak yang digelar menjelang matahari terbenam menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan internasional. Namun, untuk menjaga kesakralan pura, pengelola menerapkan pembatasan area inti, aturan berpakaian yang ketat, serta penyediaan informasi etika kunjungan dalam berbagai bahasa. Meski berbagai upaya telah dilakukan, ketegangan antara fungsi sakral dan fungsi komersial tetap terasa. Kehadiran ribuan wisatawan setiap hari berpotensi mengganggu suasana spiritual pura. Pertunjukan budaya yang dikemas untuk wisatawan juga dikhawatirkan mengalami pergeseran makna, dari ritual sakral menjadi tontonan semata. Sistem tiket masuk dan orientasi keuntungan menunjukkan bahwa pura tidak hanya berfungsi sebagai ruang spiritual, tetapi juga sebagai pusat ekonomi komunitas.

Di sisi lain, masyarakat adat dan pengelola pura berupaya aktif menjaga keseimbangan tersebut. Pengawasan dilakukan oleh pemuda adat, dana pariwisata dialokasikan untuk kegiatan keagamaan, dan kode etik kunjungan terus diperbarui. Strategi ini mencerminkan praktik glokalisasi

yang relatif ideal, di mana keterbukaan terhadap dunia global tetap dikendalikan oleh nilai dan norma lokal.



Sebagai pembandingan, praktik pengelolaan situs budaya dan ruang sakral dalam konteks pariwisata di Indonesia dapat dilihat pada Kompleks Candi Borobudur dan kawasan budaya Tana Toraja. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa interaksi antara kepentingan global khususnya pariwisata dan pengakuan internasional dengan nilai dan struktur lokal tidak bersifat pasif, melainkan dinegosiasikan secara aktif oleh komunitas setempat melalui mekanisme sosial dan kelembagaan yang mereka miliki.

Pada Kompleks Candi Borobudur, penelitian Hafizhuddin (2024) menegaskan pentingnya peran Lembaga Adat Desa (LAD) sebagai aktor lokal dalam pelestarian situs warisan dunia. LAD memiliki legitimasi budaya dan pengetahuan lokal yang kuat, sehingga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai spiritual, historis, dan sosial Candi Borobudur. Namun demikian, studi tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan yang bersifat top-down cenderung meminggirkan peran lembaga adat, sehingga memicu konflik sosial dan ketegangan antara kepentingan pelestarian, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam konteks ini, glokalisasi tercermin melalui upaya komunitas lokal untuk tetap mempertahankan peran mereka sebagai penjaga makna budaya, meskipun berada dalam kerangka pengelolaan global seperti UNESCO dan industri pariwisata internasional. Keterlibatan LAD melalui mekanisme konsultatif dan manajemen kolaboratif

dipandang sebagai strategi penting untuk menjembatani kepentingan global dan kebutuhan lokal, sekaligus memastikan keberlanjutan situs secara jangka panjang

Sementara itu, kajian Adams (2003) mengenai Tana Toraja menunjukkan bahwa situs budaya dan lanskap adat tidak dapat dipahami sebagai warisan yang statis. Dalam kasus desa Kete Kesu, proses menuju pengakuan sebagai situs warisan budaya melibatkan interaksi kompleks antara komunitas lokal, negara, dan aktor global seperti UNESCO. Adams menekankan bahwa konsep heritage di Toraja tidak hanya dimaknai sebagai pelestarian masa lalu, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi, prestise, dan manfaat ekonomi di masa kini. Masyarakat lokal secara aktif menegosiasikan makna warisan budaya mereka, menyesuaikan ritual, arsitektur, dan representasi budaya agar tetap relevan di tengah tuntutan pariwisata global. Dengan demikian, glokalisasi di Tana Toraja tampak sebagai proses dinamis, di mana nilai-nilai lokal tidak hilang, tetapi direkonstruksi dan diposisikan ulang dalam relasi dengan kekuatan global.

Preseden dari Borobudur dan Tana Toraja menunjukkan bahwa glokalisasi dalam pariwisata budaya di Indonesia bukan sekadar adaptasi teknis, melainkan proses sosial dan politik yang melibatkan negosiasi makna, kekuasaan, dan identitas. Keberhasilan pengelolaan situs budaya sangat bergantung pada pengakuan terhadap peran komunitas lokal sebagai pemilik nilai dan pengetahuan, bukan hanya sebagai objek pariwisata.

Dalam konteks Bali, Pura Luhur Uluwatu dapat dipahami melalui kerangka yang sama. Pengelolaan pura sebagai destinasi wisata menuntut keseimbangan antara keterbukaan terhadap wisatawan global dan perlindungan nilai sakral yang hidup dalam masyarakat adat. Seperti halnya LAD di Borobudur dan komunitas adat di Tana Toraja, masyarakat Bali memiliki potensi untuk menjadi aktor utama dalam mengatur batas antara ruang sakral dan profan. Glokalisasi dalam pariwisata Bali, dengan demikian, tidak hanya berarti membuka budaya lokal ke panggung global, tetapi juga memastikan bahwa pura tetap berfungsi sebagai pusat spiritual dan identitas budaya yang bermakna bagi generasi mendatang.

Kesimpulan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa glokalisasi merupakan kerangka penting dalam memahami dinamika pariwisata budaya di Bali, khususnya dalam pengelolaan pura sebagai destinasi wisata. Globalisasi melalui pariwisata tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi keberlanjutan nilai-nilai budaya dan kesakralan ruang ibadah. Dalam konteks ini, glokalisasi berperan sebagai strategi adaptif yang memungkinkan masyarakat lokal menyaring dan mengelola pengaruh global tanpa kehilangan kendali atas identitas budaya mereka.

Kasus Pura Luhur Uluwatu memperlihatkan bagaimana nilai sakral dan kepentingan pariwisata saling bernegosiasi. Berbagai kebijakan lokal seperti pengaturan zonasi, aturan berpakaian, kode etik kunjungan, serta keterlibatan masyarakat adat dan pemuda lokal menjadi bukti bahwa keterbukaan terhadap pariwisata global tidak harus berujung pada hilangnya makna religius. Sebaliknya, praktik-praktik tersebut mencerminkan upaya sadar masyarakat Bali dalam menjaga keseimbangan antara fungsi spiritual pura dan kebutuhan ekonomi komunitas.

Perbandingan dengan pengelolaan Kompleks Candi Borobudur dan kawasan budaya Tana Toraja semakin menegaskan bahwa glokalisasi dalam pariwisata budaya di Indonesia bukan sekadar konsep teoretis, melainkan praktik nyata yang melibatkan negosiasi sosial, politik, dan budaya.

Keberhasilan pengelolaan situs-situs tersebut sangat bergantung pada pengakuan dan penguatan peran komunitas lokal sebagai aktor utama, bukan sekadar objek pariwisata atau penerima dampak kebijakan dari atas.

Dengan demikian, pengelolaan pura sebagai destinasi wisata di Bali idealnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian nilai sakral dan keberlanjutan budaya. Glokalisasi menawarkan jalan tengah yang relevan: membuka ruang bagi pariwisata global, sekaligus memastikan bahwa budaya lokal tetap hidup, bermakna, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Daftar Pustaka

Adams, K. M. (2003). The politics of heritage in Tana Toraja, Indonesia: Interplaying the local and the global. *Indonesia and the Malay World*, 31(89), 91–117. <https://doi.org/10.1080/1363981032000103956>

Benyamin, M. F., & Prasetya, A. R. (2015). Glokalisasi Karya Seni Batik Indonesia Sebagai Strategi Komunikasi Multikultural Dalam Era Komunitas Asean. *Conference on Communication and New Media Studies: Peran Dan Kontribusi Kajian Komunikasi Dalam Era Komunitas ASEAN, May*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3430.1529>

Drori, Gili S., Markus A. Höllerer, Peter Walgenbach. (2013). *Global Themes and Local Variations in Organization and Management: Perspectives on Glocalization*. Chicago: Routledge.

<https://doi.org/10.13140/2.1.1239.4242>

Hafizhuddin, M. (2024). Peran Lembaga Adat Desa dalam pelestarian Candi Borobudur sebagai warisan dunia. *AMERTA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 42(1), 45–60. <https://doi.org/10.55981/amt.2024.3902>

Subawa, I. M. P. (2018). Bali dalam Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan di Tengah Perkembangan Pariwisata. *Parwisata Budaya*, 3(1), 95–109. <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/parbud/article/view/73/28>

Widiastini, N. M. A., Adiputra, I. M. P., Sujana, E., & Yudiaatmaja, F. (2015). IBIKK Wisata Religi Hindu Bali. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 185–191. <https://doi.org/10.23887/jwl.v4i2.9606>



Dinar Sukma Pramesti adalah dosen tetap di Politeknik Internasional Bali program studi Magister Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Ia aktif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan desa wisata